

LAPORAN MAGANG
KOMISI X DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA



DOSEN PEMBIMBING:

Dini Septyana Rahayu, S.IP.,M.Hub.Int.

DIAJUKAN OLEH:

Mohammad Damayantar Etnik Butudoka

40-2019-511-028

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS HUMANIORA

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

2022

LAPORAN
MAGANG MAHASISWA HUBUNGAN INTERNASIONAL
KOMISI X DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dipersiapkan dan Ditulis Oleh:

Mohammad Damayantar 402019511028
Etnik Butudoka

Dipertanggung Jawabkan di Depan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Pada Tanggal 28 September 2022



Dini Septyana Rahayu, S.IP.,M.Hub.Int.
NIY. 170608

Laporan Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Pembuktian Magang

Ponorogo, 4 Oktober 2022

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

Novi Rizka Amalia, M.A.
NIY. 180643

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkah nikmat-Nya yang tidak terhitung sehingga penulis dapat menyelesaikan program magang di Komisi X Dewan Republik Rakyat Indonesia. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaatnya dikemudian hari.

Penulis menyadari bahwa magang yang telah dilakukan selama kurang lebih 60 (enam puluh) hari ini, tidak cukup untuk menjadikan penulis sebagai individu yang dekat dengan masyarakat dan mampu menjadi *problem solver* bagi setiap permasalahan yang berkembang di dalamnya. Banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab, banyak permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Begitu pula dengan laporan magang ini, penulis harus mengakui bahwasanya laporan ini tidaklah cukup untuk menggambarkan apa yang telah didapatkan. Padanya masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka dengan berbagai bentuk kritik dan saran untuk menjadikan laporan magang ini menjadi lebih baik.

Kemudian, kepada setiap pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam suksesnya magang ini:

1. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun, terutama do'a yang terus mengalir tiada henti-hentinya;
2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Humaniora al-Ustadz Dr, Mohammad Latief M.A, dan selaku wakil Dekan Fakultas Humaniora al-Ustadz Sofi Mubarak LC., M.A., Dan ustazah Hesti Rokhaniyah, M.Pd. Kepala Program Studi Hubungan Internasional al-Ustazah Novi Rizka Amaliah M.A yang selalu memberikan kami nasehat dan dukungannya dalam segala bentuk;

3. Kepada Bapak Edi Setiawan selaku pembimbing lapangan yang tidak kenal lelah mengajarkan hal-hal baru serta mendorong untuk terus maju meraih mimpi;
4. Kepada Al-Ustadzah Dini Septyana Rahayu, M.Hub.Int. selaku dosen pembimbing magang yang tidak bosan untuk memberikan arahan dan evaluasi dalam proses magang ini;
5. Kepada segenap dosen, staf, dan karyawan di UNIDA Gontor, khususnya Prodi HI UNIDA Gontor yang selalu mendorong kami selaku mahasiswa untuk maju dan berkarya sampai titik ini dan titik-titik berikutnya dikemudian hari;
6. Kepada seluruh staf dan tenaga ahli di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang telah menerima penulis dengan baik selama program magang di sana;
7. Teman-teman mahasiswa Prodi HI UNIDA Gontor yang selalu mendukung satu sama lain demi kelancaran selama magang di Jakarta.

penulis ucapkan ribuan terima kasih, karena tanpa dukungan dan bantuan kalian, keberhasilan ini hanyalah angan-angan belaka.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga laporan ini dapat memberi manfaat untuk banyak pihak, baik dari segi pengalaman, pengetahuan, peluang dan kesempatan yang ada di instansi ini. Kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menggali pengalaman kerja lebih banyak pada Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia di lain waktu.

Ponorogo, 31 Agustus 2022

LEMBAR PENILAIAN MAGANG

**PENILAIAN PRAKTEK KERJA NYATA
DI DAERAH/INSTANSI/PERUSAHAAN/LEMBAGA TEMPAT MAGANG**

Nama & NIM : Muhammad Damadhar

Nama & Alamat PKN : D.R.R. Ri

Pembimbing Lapangan : E. S. Setiawan

Lama PKN : 70 Hari

NO.	ITEM EVALUASI	NILAI
1.	Etos kerja di lapangan	<u>100</u>
2.	Pelaksanaan dan tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan	<u>100</u>
3.	Kemampuan bekerja dalam tim	<u>100</u>
4.	Kemampuan melakukan inisiatif dalam pekerjaan	<u>90</u>
5.	Kemampuan memberikan ide-ide kreatif	<u>99</u>
6.	Kehadiran di lokasi magang	<u>100</u>
TOTAL NILAI		

*Nilai dalam Bentuk angka 1 – 100

Pembimbing Lapangan:


 (E. S. Setiawan SE. MPA)
 NIP/NRP. A-456

NILAI FINAL LAPANGAN/SURVEI/MAGANG
PRAKTEK KERJA NYATA
DI DAERAH/INSTANSI/PERUSAHAAN/LEMBAGA TEMPAT MAGANG

Nama Tempat PKN : D.P.P. RI

Pembimbing Lapangan : E. h. Selwa

Lama PKN : 70 Hari

$$\text{Nilai Rata-Rata} = \frac{\text{Total Nilai}}{6} = \frac{589}{6} = \underline{\underline{98}}$$

Keterangan Nilai:

Nilai diberikan dalam bentuk angka mulai 0 s/d 100, dengan acuan sbb:

- A = 80 < - 100
- B+ = 75 < - 80
- B = 69 < - 75
- C+ = 60 < - 69
- C = 55 < - 60
- D+ = 50 < - 55
- D = 45 < - 50
- E = 0 < - 44

.....kota.....
Pembimbing Lapangan,


(E. h. Selwa SE.MM)
NIP/NRP. A-956

LEMBAR PENILAIAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

No.	Nama (Nomor Induk Mahasiswa)	Fakultas/ Prodi	Proposal/ Persiapan	Operasional	Laporan	Seminar Kegiatan Magang	Jumlah
1.	Mohammad Damayantar Etnik Butudoka (402019511028)	Humaniora/ Hubungan Internasional					

Ponorogo, 4 Oktober 2022

Dosen Pembimbing Lapangan

Dini Septyana Rahayu, M.Hub.Int.
NIY. 170608

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR	3
LEMBAR PENILAIAN MAGANG.....	5
LEMBAR PENILAIAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN	7
BAB I.....	11
PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Tujuan Magang di Komisi X DPR RI	12
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	13
BAB II.....	14
DESKRIPSI UMUM	14
A. Sejarah Singkat Dewan Republik Rakyat Republik Indonesia.....	14
B. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	15
C. Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.....	17
D. Struktur Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia	18
BAB III	19
DESKRIPSI KHUSUS	19
A. Profil Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Komisi X DPR RI. 19	
C. Mitra Kerja Komisi X DPR RI	20
D. Tugas Komisi X DPR RI	21
E. Pelaksanaan Tugas Komisi X DPR RI	23
BAB IV	27
HASIL LAPORAN MAGANG	27
A. Laporan Kegiatan Harian.....	27
B. Manfaat Kegiatan Magang di Komisi X DPR RI	30
C. Tiga Pilar Magang	31
BAB V	34
KESIMPULAN.....	34
DAFTAR PUSTAKA	35
Kritik dan Saran	36
Lampiran Surat Keterangan Selesai Praktik Magang	37

Lampiran Galeri Kegiatan..... 38
Lain - lain..... 40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program magang adalah salah satu kegiatan wajib yang harus diikuti seluruh Mahasiswa Hubungan Internasional UNIDA Gontor. Menurut Sudjana, magang adalah cara penyebaran informasi yang dilakukan secara terorganisasi. Menurut Rusidi, magang merupakan salah satu mata kuliah yang harus diselesaikan setiap mahasiswa sebagai cara mempersiapkan diri untuk menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja. Magang adalah proses belajar dari seorang ahli melalui kegiatan dunia nyata. Selain itu magang juga merupakan proses mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan problem nyata di sekitar. Selama proses magang, mahasiswa mempelajari dan memahami banyak hal yang terjadi di dunia kerja dengan berinteraksi langsung dengan fenomena yang terjadi di lapangan kerja.

Dalam kegiatan Praktik Magang penulis memilih untuk melakukan Praktik Magang di di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) salah satu lembaga penting yang harus dimiliki oleh negara. Badan tersebut merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 Oktober 2019 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang: Pendidikan, Olahraga, dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Alasan Penulis memilih untuk melakukan Praktik Magang di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak terlepas dari rasa ingin tahu penulis akan pekerjaan yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang politik dan pengalaman bekerja.

Saat masa magang selama 2 bulan di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) penulis mendapatkan banyak pengalaman dan hal-hal baru yang tidak sepenuhnya didapatkan di bangku perkuliahan. Seperti halnya proses perumusan rekomendasi kebijakan luar negeri melalui berbagai

kegiatan seperti Forum Group Discussion Badan Kerjasama Antar Parlemen (FGD BKSAP), Rapat Dengar Pendapat, Rapat Kerja Nasional, Sidang Paripurna dan hal-hal lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Selama program magang ini, penulis diterima dan dibimbing dengan baik oleh para staf dan tenaga ahli di lingkungan kerja Komisi X DPR RI. Hal ini terbukti di keseharian penulis, mereka sangat terbuka dalam permasalahan, tegas dalam membimbing dan tak sungkan untuk mengajari hingga semuanya berjalan dengan baik. Tidak jarang penulis dilibatkan untuk membantu dalam beberapa kegiatan penting yang terkait dengan Rapat Dengar Pendapat Umum dan Rapat Kerja. Proses magang selama dua bulan tersusun di dalam laporan magang ini. Penulis berharap agar semua pihak yang terkait dalam program magang ini dapat saling mendapatkan pengalaman yang berarti dan dapat meningkatkan SDM mahasiswa selaku subjek atau pelaku magang.

B. Tujuan Magang di Komisi X DPR RI

Bagi Prodi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, program magang ditetapkan sebagai salah satu pengabdian yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswanya. Adapun tujuan program ini sebagai berikut;

1. Mendapatkan wawasan seputar dunia kerja dalam bidang Politik dan Diplomasi.
2. Mendapatkan pengalaman bekerja.
3. Melatih kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap pekerjaannya.
4. Mengenalkan mahasiswa terhadap gambaran dunia kerja yang sebenarnya.
5. Meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mahasiswa yang berkaitan dengan subjek perkuliahan yang telah dipelajari;
6. Sebagai sarana aktualisasi pengabdian diri kepada instansi yang dituju;
7. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi mahasiswa dengan orang-orang yang ada dalam lingkungan kerja.

8. Membuka kesempatan *networking* antar instansi, universitas, maupun individu mahasiswa yang masih dalam batas keilmuan hubungan internasional;
9. Sebagai sarana dakwah mahasiswa UNIDA Gontor di tempat penugasan.

Selama program magang, mahasiswa dituntut untuk mengikuti seluruh kegiatan yang ditugaskan oleh pihak instansi. Tugas tersebut berkaitan dengan administrasi kantor, surat menyurat, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, logistik, dan lain-lain. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat merasakan situasi dan pola bekerja yang nyata sesuai dengan instansi terkait.

Pemahaman mahasiswa tentang dunia kerja semakin terbuka saat mengikuti program magang ini. Individu setiap mahasiswa akan lebih berkembang jika berinteraksi langsung dengan situasi yang ada di lapangan. Mahasiswa yang sebelumnya banyak menghabiskan waktu di kelas, perpustakaan, dan organisasi, yang cenderung kepada pengembangan diri, di dunia kerja mereka akan memasuki situasi dimana mereka akan menemukan hal-hal yang identik dengan senioritas, tekanan atasan, *deadline*, kelangsungan instansi, lembur, kepentingan, ketepatan waktu, kompromi dan lain sebagainya. Sehingga pengalaman yang pernah mereka rasakan saat magang akan memberi rangsangan terhadap dunia kerja yang akan mereka tentukan di masa mendatang.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang ini dilaksanakan dalam waktu 2 bulan terhitung mulai tanggal 01 Juli sampai dengan 31 Agustus 2022. Penempatan magang kali ini berada di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini terletak Dewan Republik Rakyat Indonesia, Jl. Jenderal Gatot Subroto Gedung Nusantara I Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (10270).

BAB II

DESKRIPSI UMUM

A. Sejarah Singkat Dewan Republik Rakyat Republik Indonesia

Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI.

Tugas KNIP pada saat setelah Kemerdekaan Indonesia yaitu membantu dan menjadi pengawas kinerja Presiden dalam melaksanakan tugas. Posisi wewenang KNIP dikukuhkan melalui Maklumat X, pada 16 Agustus 1946 yang memberikan kuasa legislatif terhadap KNIP.

Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode:

1. Volksraad
2. Masa perjuangan Kemerdekaan
3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.

Sidang KNIP yang pertama dilaksanakan pada 29 Agustus 1945, maka ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 1945 sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI. Sidang pertama KNIP dipimpin oleh Mr. Kasman Singodimedjo,

Mr.Sutardjo Kartohadikusumo, Mr.J.Latuharhary dan Adam Malik. Selanjutnya KNIP bertugas membantu Presiden menjalankan kenegaraan dan memberikan masukan kepada Presiden.

Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, KNIP beranggotakan 137 orang. KNIP telah mengadakan sidang di Kota Solo tahun 1946, Malang pada 1947 & Yogyakarta pada 1949.

Berdasarkan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945), Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan untuk melaksanakan tiga fungsi: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dimana setiap Anggota Dewan wajib mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilinya (konstituen) sehingga menjadikan mereka “Wakil Rakyat”.¹

B. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Republik Rakyat Indonesia dapat merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.²

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
- Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan

¹ (RI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 2016)

² (Indonesia, 1945)

penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)

- Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
- Menetapkan UU bersama dengan Presiden
- Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
- Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
- Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
- Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

- Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
- Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
- Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
- Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
- Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

C. Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia³

Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dikutip dari laman jejaring resminya adalah sebagai berikut;

1. Visi
“Terwujudnya DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel”
2. Misi
 - a. Menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk pembangunan nasional dalam rangka representasi rakyat

³ (RI, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2017)

- b. Memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbangan pemerintah

D. Struktur Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

Struktur Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah diatur dalam telah ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2019 melalui Keputusan DPR RI Nomor 34/DPR RI/I/2019-2020 tentang Pembagian Bidang Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sebagai berikut⁴:



⁴ (RI, putusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 34 Tahun 2019-2020 tentang pembagian bidang tugas, 2019)

BAB III

DESKRIPSI KHUSUS

A. Profil Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Komisi X DPR RI.

1. Profil

- (1) Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.
- (3) Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah persiapan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang termasuk dalam ruang lingkup acara.

Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap dan jumlahnya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan Tahun Sidang.

2. Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia;

Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang bersifat tetap dan jumlahnya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan Tahun Sidang.

Pada DPR Periode 2019-2024 telah ditetapkan jumlah Komisi sebanyak 11 Komisi. Hal ini berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Oktober 2019. Salah satu Komisi yang ada di DPR adalah Komisi X.⁵

B. Ruang Lingkup Komisi X DPR RI

Komisi X DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 Oktober 2019 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

1. Pendidikan, Riset;
2. Olah Raga; dan
3. Kepariwisata

C. Mitra Kerja Komisi X DPR RI

Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI sebagaimana tersebut di atas, Komisi I DPR RI berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 tanggal 29 Oktober 2019, memiliki Mitra Kerja sebagai berikut:⁶

⁵ (DPR RI, 2016)

⁶ ibid

- a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- b. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- c. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

D. Tugas Komisi X DPR RI

Seperti Komisi lainnya, Komisi I DPR RI mempunyai tugas dalam bidang:

1. Legislasi (Pembentukan undang-undang)

Dalam bidang pembentukan undang-undang, Komisi X DPR RI mempunyai tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi X DPR RI. Untuk itu, Komisi I DPR RI dapat melaksanakan:

- a. Penyusunan (perumusan) RUU Usul Inisiatif DPR
- b. Pembahasan terhadap:
 1. RUU Usul Inisiatif Pemerintah
 2. RUU Usul Inisiatif DPR
 3. RUU Kumulatif Terbuka, yaitu Pengesahan Perjanjian Internasional (Ratifikasi)

Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan undang-undang, Komisi X DPR RI menerima partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU yang sedang dirumuskan dan dibahas oleh Komisi X DPR RI. Masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis maupun secara langsung melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI. Disamping itu, dalam merumuskan dan membahas RUU, Komisi X DPR RI juga meminta masukan dari Pakar/Akademisi/Pejabat Pemerintah melalui RDPU/RDP maupun melalui Kunjungan Kerja.

2. Budgeting (anggaran)

Dalam bidang anggaran, Komisi X DPR RI mempunyai tugas:

- a. Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBN yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dalam ruang lingkup tugas Komisi X DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah.
- b. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN serta mengusulkan perubahan RKAKL yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi X DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah.
- c. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian/Lembaga (KL) yang menjadi Mitra Kerja Komisi X DPR RI.
- d. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN dan menyampaikan hasil pembahasan RAPBN, RKAKL, dan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi X DPR RI kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi
- e. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi X DPR RI berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran KL oleh Badan Anggaran
- f. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan Komisi X DPR RI dengan Mitra Kerja Komisi X DPR RI untuk bahan akhir penetapan APBN
- g. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi Mitra Komisi X DPR RI
- h. Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan

- i. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi X DPR RI.

3. Pengawasan

Dalam bidang pengawasan, Komisi X DPR RI mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi X DPR RI
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi X DPR RI
- c. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI
- d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah
- e. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan
- f. Menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun swasta, sesuai dengan bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar-Parlemen ⁷

E. Pelaksanaan Tugas Komisi X DPR RI

Dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, Komisi X DPR RI dapat mengadakan:

1. Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Pimpinan Lembaga

Dalam hal ini Komisi X DPR RI mengadakan Raker dengan:

⁷ ibid

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi X DPR RI, yaitu:
 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 3. Menteri Pemuda dan Olahraga
 4. Kepala Perpustakaan Nasional
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang mewakili instansinya yang bukan menjadi Mitra Kerja Komisi X DPR RI, apabila dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas Komisi X DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran, atas persetujuan Pimpinan DPR RI serta memberitahukan kepada Pimpinan Komisi yang bersangkutan.
 2. Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 3. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya

Dalam hal ini, Komisi X DPR RI dapat mengadakan RDP dengan:

- a. Pejabat Pemerintah yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI, yaitu Pejabat di Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI.
- b. Pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang bukan merupakan Mitra Kerja Komisi X DPR RI, apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugas Komisi X DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.
 4. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

Dalam hal ini, Komisi X DPR RI dapat mengadakan RDPU dengan Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kalangan Swasta, Pakar, dan Akademisi, baik atas permintaan Komisi I DPR RI maupun atas permintaan pihak lain dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan tugas Komisi X DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.

5. Rapat Kerja Gabungan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi X DPR RI dapat mengadakan Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi lainnya yang terkait dengan materi/substansi yang akan dibahas.

6. Kunjungan Kerja (Kunker)

a. Kunker dalam Masa Reses

Dalam setiap reses masa persidangan, Komisi I DPR RI dapat melaksanakan Kunker ke:

1. Dalam Negeri, untuk mengetahui dan meninjau langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi Mitra Kerja Komisi I DPR RI di daerah dan sarana dan prasarana yang ada.
2. Luar Negeri:
 - a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi X DPR RI terkait dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN termasuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan serta untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di Luar Negeri.
 - b. Dalam rangka memberikan penguatan Diplomasi Parlemen terhadap pelaksanaan Politik Luar Negeri RI, melalui forum pertemuan antar parlemen, pertemuan dengan pimpinan parlemen, dan pemerintahan terkait di negara yang dikunjungi, menjadi dasar forum-forum kegiatan Bilateral, Regional, dan Multilateral.

b. Kunker Spesifik

Apabila terjadi kasus-kasus yang bersifat spesifik yang berkaitan dengan permasalahan dalam ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI, maka Komisi X DPR RI dapat melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke daerah dalam rangka mendapatkan masukan/informasi langsung mengenai permasalahan yang terjadi dan mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.⁸

⁸ Ibid.

BAB IV

HASIL LAPORAN MAGANG

A. Laporan Kegiatan Harian

Hari, Tanggal	Keterangan
Senin, 4 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Pengarahan magang oleh Staf Ahli DPR RI dan pembagian peserta magang ke Komisi yang telah ditentukan. - Mencatat Release Rapat Kerja (Raker) Komisi X dengan Menparekraf (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Indonesia Bapak Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA., MBA.
Selasa, 5 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Mencatat Release Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kebijakan Kurikulum Komisi X dengan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Bapak Anindito Aditono, S.Psi., M.Phil., Ph.D.
Rabu, 6 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Mencatat Resume Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Guru Lulus Passing Grade PPPK - Membuat Laporan Rumah Aspirasi 2020 & 2021 pada Masa Reses Anggota DPR RI Ibu Hj. Sakinah Aljufri. S.Ag
Kamis, 7 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Laporan Reses Sekali Setahun Tahun 2021
Jumat, 9 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Laporan Kunjungan Spesifik (Kunspik) 2021

Senin, 11 Juli 2022	- Membuat Membuat Laporan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Oleh Anggota MPR RI Ibu Hj. Sakinah Aljufri. S.Ag
Selasa, 12 Juli 2022	- Membuat Laporan Reses IV Anggota DPR RI Ibu Hj. Sakinah Aljufri. S.Ag
Rabu, 13 Juli 2022	- Menerima Tamu Wanita Islam Alkhairaat (WIA), Manokwari, Papua Barat dengan Ibu Hj. Sakinah Aljufri. S.Ag - Mengurus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Wanita Islam Alkhairaat Manokwari
Kamis, 14 Juli 2022	- Menerima Paket untuk Anggota DPR RI Ibu Hj. Sakinah Aljufri. S.Ag - Mengurus ID Card Pribadi
Jumat, 15 Juli 2022	- Mengambil Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Biro Perjalanan Gedung Sekretaris Jenderal DPR RI
Senin, 18 Juli 2022	- Membuat Laporan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Oleh Anggota MPR RI Ibu Hj. Sakinah Aljufri. S.Ag
Selasa, 19 Juli 2022	- Membuat Surat Undangan Kepada Ketua MPR RI Bapak H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A.
Rabu, 20 Juli 2022	- Membuat Laporan Kunjungan Daerah Pemilihan (KUNDAPIL) 2022
Kamis, 21 Juli 2022	- Menerima Surat untuk Anggota DPR RI Ibu Hj. Sakinah Aljufri. S.Ag
Jumat, 22 Juli 2022	- Mengambil dan Memproses Surat Masuk untuk Anggota DPR RI
Senin, 25 Juli 2022	- Mengirim Laporan Kundapil 2022 ke Staf Ahli DPR RI
Selasa, 26 Juli 2022	- Membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Sosialisasi Daerah Anggota DPR RI

Rabu, 27 Juli 2022	- Mengisi Google Form Sosialisasi daerah pemilihan Tahap III Tahun 2022
Kamis, 28 Juli 2022	- Menginput Kegiatan Sosialisai 4 Pilar MPR RI di website
Jumat, 29 Juli 2022	- Menerima dan Memproses Surat Masuk untuk Anggota DPR RI
Senin, 1 Agustus 2022	- Mengantar Berkas ke Kementerian Agama Republik Indonesia
Selasa, 2 Agustus 2022	- Mengikuti Konferensi Nasional Ketahanan Pangan Pelajar Islam Indonesia
Rabu, 3 Agustus 2022	- Menjadi Notulensi Forum Ketahanan Pangan Indonesia
Kamis, 4 Agustus 2022	- Mengikuti Acara Temu Tokoh Pelajar Islam Indonesia bersama Jusuf Kalla
Jumat, 5 Agustus 2022	- Izin tidak memasuki kantor dengan alasan sakit
Senin, 8 Agustus 2022	- Mengirim File Passport Anggota DPR RI Kepada Staf Ahli DPR RI
Selasa, 9 Agustus 2022	- Membuat Laporan Penyerahan Beasiswa Program Indonesia Pintar Oleh DPR RI
Rabu, 10 Agustus 2022	- Mengantar Berkas ke Fraksi Anggota DPR RI
Kamis, 11 Agustus 2022	- Menerima Surat untuk Anggota DPR RI Ibu Hj. Sakinah Aljufri. S.Ag
Jumat, 12 Agustus 2022	- Merngambil Surat Masuk Kepada Anggota DPR RI dari Fraksi.
Senin, 15 Agustus 2022	- Mengurus berkas Anggota DPR RI pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Agama RI
Selasa, 16 Agustus 2022	- Mengantar Surat Tugas ke Sekretariat Jenderal DPR RI

Rabu, 17 Agustus 2022	- Menerima dan Memproses Surat Kepada Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI
Kamis, 18 Agustus 2022	- Membuat CV Bahasa Inggris Anggota DPR RI Ibu Hj. Sakinah Aljufri. S.Ag
Jumat, 19 Agustus 2022	- Mengambil dan Memproses Surat Masuk untuk Anggota DPR RI
Senin, 22 Agustus 2022	- Mencatat Release Rapat Kerja (Raker) Komisi X dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Selasa, 23 Agustus 2022	- Membuat Laporan Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPR RI
Rabu, 24 Agustus 2022	- Mengirimkan Laporan Kunker Anggota Ke Fraksi DPR RI
Kamis, 25 Agustus 2022	- Mencatat Bahan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Kebaya Foundation
Jumat, 26 Agustus 2022	- Mengambil Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Gedung Sekretaris Jendral DPR RI

B. Manfaat Kegiatan Magang di Komisi X DPR RI

Poin-poin berikut adalah beberapa hasil yang dicapai dari kegiatan magang, yaitu:

- Memahami bagaimana ruang lingkup kerja dan apa yang menjadi tanggung jawab yang dimiliki Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia;
- Mendapatkan pengalaman kerja selama kurang lebih dua bulan di lembaga tinggi negara Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia khususnya di Komisi X

- Mendapatkan kesempatan untuk menjadi panitia dalam beberapa kegiatan Seperti Konferensi Nasional Ketahanan Pangan Indonesia.
- Bertambahnya wawasan Hubungan Internasional pada Kegiatan Rapat dengar Pendapat dan Rapat Kerja Nasional.

Harapannya kegiatan magang tersebut dapat menjadi sarana dalam menjalin kerjasama (*networking*) antara Universitas Darussalam Gontor sebagai lembaga penyedia sumber daya manusia dan Komisi X DPR RI sebagai institusi penyerap sumber daya manusia. Selanjutnya, penulis mengharapkan adanya masukan atau *feedback* dari instansi terkait dalam rangka pengembangan diri mahasiswa dan pengembangan institusi pendidikan.

C. Tiga Pilar Magang

Dengan adanya kegiatan magang ini, penulis dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh jurusan untuk melaksanakan proses 3C (*Capacity Building, Corporate Promotion, and Community Empowerment*) di tempat magang, antara lain sebagai berikut:

a. Promosi Universitas Darussalam Gontor

Dalam upaya melaksanakan kegiatan promosi Universitas Darussalam Gontor, penulis melakukan promosi melalui dialog, tukar pikiran dengan para Staf atau Tenaga Ahli Komisi X DPR RI dan ketika penulis mengantarkan berkas ke Sekretaris Jenderal DPR RI yang ada di instansi tempat magang, yaitu :

1. Dengan memperkenalkan bahwa UNIDA Gontor saat ini memiliki 17 program studi yang salah satunya adalah Program Studi Hubungan Internasional. Program Studi Hubungan Internasional UNIDA berbeda dengan kampus lain dengan islamisasi ilmu pengetahuannya. Program studi Hubungan Internasional termasuk dalam prodi yang memiliki mahasiswa terbanyak di UNIDA Gontor.

2. Memperkenalkan bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor berbeda dengan pondok salaf pada umumnya. Gontor adalah pondok pesantren modern bukan dalam arti fasilitas atau gedung mewah, melainkan dari sistem dan cara berpaikannya.

b. Pengetahuan Tentang Hubungan Internasional

Pengetahuan mengenai Hubungan Internasional yang didapatkan dari tempat magang adalah materi-materi mengenai isu politik dari *sharing* bersama para Staf dan Tenaga Ahli dan perkembangan program kerja para Menteri Republik Indonesia di lingkup Komisi X yang dibahas oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Rapat Kerja Nasional. Kesempatan tersebut menjadi sarana menambah khasanah pengetahuan, memperkaya pengalaman serta mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapatkan di dalam kelas. Namun perlu diingat bahwa tidak semua data yang baca bisa digunakan dalam penelitian karena sifatnya yang rahasia.

c. Kompetensi individu

Beberapa kompetensi individu yang diperoleh selama magang berlangsung adalah:

1. Menambah profesionalisme dalam kinerja tim
2. Memahami cara berkomunikasi dengan baik kepada atasan maupun kepada bapak/ibu staf/ karyawan di kantor.
3. Meningkatkan kedisiplinan diri dengan ketepatan waktu dan suasana lingkungan kerja yang cepat.
4. Meningkatkan ketelitian diri karena dituntut untuk mengingat berkas-berkas dan mengelurakan kembali apabila dibutuhkan.
5. Meningkatkan kesabaran diri karena tiap individu di lapangan kerja memiliki latar belakang yang berbeda.

Dalam pelaksanaan kegiatan magang ini banyak memberikan nilai-nilai positif bagi mahasiswa. Salah satunya yaitu mendapatkan pengalaman serta merasakan bekerja langsung di instansi pemerintah dan melihat kinerja yang ada dalam instansi pemerintah. Kegiatan ini sebagai pengalaman bekerja

sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan magang tidak jauh dari kata kekurangan, akan tetapi kekurangan yang ada diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki menjadi lebih baik lagi dimasa depan

BAB V

KESIMPULAN

Kegiatan Praktik Magang ini merupakan satu kegiatan yang bermanfaat, dimana praktikan mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman baru dan pastinya mengenal orang-orang baru. Praktik Magang ini telah memberikan banyak manfaat dan memberikan ilmu bagi beberapa pihak, yaitu mahasiswa sebagai praktikan, universitas sebagai lembaga pendidikan, dan Komisi X DPR RI sebagai Instansi terkait. Adapun pengalaman baik yang mesti diteruskan, merupakan pengalaman-pengalaman yang hanya bisa didapatkan setelah terlibat langsung di dalam Komisi X DPR RI . Hal-hal tersebut berupa seni dalam berkomunikasi dan negoisasi, bertingkah laku dengan atasan dan bawahan, berpakaian sesuai dengan situasi dan kondisi serta masih banyak lainnya. Hal-hal tersebut banyak penulis dapatkan setelah memperhatikan secara langsung dan seksama kebiasaan baik yang muncul pada setiap Staf dan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pada akhirnya, penulis mengungkapkan bahwasanya Selama pelaksanaan kegiatan magang, Penulis mendapatkan pengalaman dalam membantu untuk menulis Release dan mengikuti Rapat Dengar Pendapat Serta Rapat Kerja Nasional, Mengurus Surat Tugas Anggota dan Surat Perjalanan Dinas. Dalam melakukan kegiatan magang, penulis memahami akan pentingnya tepat waktu saat mengerjakan tugas yang deadline dan penulis optimis bahwa dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik, komitmen, disiplin dengan waktu, dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam setiap bidang yang ada pada instansi. Namun tidak hanya ilmu yan diperlukan didalam dunia kerja, namun softskill seperti kemampuan berkomunikasi yang baik sangat diperlukan, karena sangat membantu dalam melaksanakan semua pekerjaan maupun dalam menjalin hubungan sosial yang baik antara rekan kerja pada instansi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- DPR RI*. (2016). Retrieved from Alat Kelengkapan DPR RI: <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-X>
- Indonesia, R. (1945). *Undang Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat 1*.
- RI, D. (2016). *DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA*. Retrieved from Sejarah DPR: <https://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr>
- RI, D. (2017). *Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*. Retrieved from Visi Misi DPR: <https://dpr.merdeka.com/>
- RI, D. (2019). *putusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 34 Tahun 2019-2020 tentang pembagian bidang tugas*.

\

Kritik dan Saran

KESAN TERHADAP MAHASISWA MAGANG

Perilaku yang baik akan mempengaruhi seseorang
yang baik jika nilai itu tidak berkurang
mungkin beberapa hal seperti

SARAN TERHADAP MAHASISWA MAGANG

Seorang dosen diharapkan magang dari siswa
dapat mengembangkan diri serta lebih aktif
dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan.

Lampiran Surat Keterangan Selesai Praktik Magang



SURAT KETERANGAN SELESAI KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Setiawan
Nomor Pegawai : A-456
Jabatan : Staff Ahli Anggota DPR RI
Instansi : DPR RI
Alamat Instansi : Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270

Selaku Pembimbing Institusi, Menyatakan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Damayantar Etnik Butudoka
NIM : 402019511028
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Humaniora
Universitas : Universitas Darussalam Gontor

Telah Menyelesaikan Kerja Praktik di :

Instansi : Komisi X DPR RI
Bagian : Kesekretariatan Anggota A-456
Tanggal Praktik : 4 Juli – 11 September 2022

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan secara bertanggung jawab.

Pembimbing Lapangan, 11 September 2022



Nama Pembimbing Edi Setiawan .SE.MA

Lampiran Galeri Kegiatan



1. Melakukan tugas kesekretariatan, menerima dan memproses surat masuk dan penulisan laporan kegiatan anggota DPR RI



2. Menjadi Notulensi Pada Forum Ketahanan Pangan Nasional dan Temu Tokoh 2022 bersama Jusuf Kalla dan Menkoplhukam Mahfud MD




3. Dokumentasi Rapat Kerja (Raker) Komisi X dengan Menparekraf Bapak Sandiaga Uno




1.1 Foto Kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Guru Lulus Passing Grade PPPK

Lain - lain



FRAKSI PKS DPR RI
BAHAN RAPAT POKSI X
SENIN, 29 AGUSTUS 2022



RDP DENGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Agenda:
Penyampaian Aspirasi

PEMBAHASAN dan PERTANYAAN;

1. FORUM GURU HONORER TULUNGAGUNG

1) Permohonan pengkaran guru honorer menjadi ASN berdasarkan kuota tanpa memperhatikan formasi pada akhirnya nanti akan menyisakan permasalahan baru. Yang telah terjadi, honorer yang sudah lulus passing grade untuk menjadi ASN dan tidak ada formasi sampai hari ini belum mendapatkan SK. Memang kita darurat kekurangan guru di berbagai wilayah, namun harus cermat meningkatnya. Kami akan terus berupaya mendorong Pemerintah untuk memperhatikan berbagai aspek agar pengangkatan honorer menjadi ASN segera terpenuhi dengan baik dan mempertimbangkan berbagai aspek.

2) Guru honorer berusia 55 tahun
Seperti halnya harapan semua guru yang telah berusia diatas 35 tahun, kami telah mendorong Pemerintah untuk memudahkan, memberil afirmasi khusus bagi para guru yang telah bekerja lebih dari lima tahun sebagai guru honorer untuk segera diangkat menjadi ASN.

3) Penempatan PPPK
Memang menjadi penting terkait penempatan P3K yang berusia tua ditempatkan di daerah masing-masing, dekat dengan tempat tinggalnya, serta di sekolah dimana mereka mengabdikan sebelumnya. Penempatan guru yang sudah berusia di atas 50 tahun ke daerah lain akan menimbulkan masalah baru. Di usianya yang sudah dibalang tidak muda lagi akan mempersulit mobilitas dalam perpindahan dan membutuhkan tenaga ekstra untuk penyesuaian lokasi baru

1. Bahan Rapat Dengar Pendapat Komisi X dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan